

# POLRES

## Hendri Kampai: Kaidah Penulisan Berita Investigasi

Updates. - POLRES.ID

Sep 16, 2024 - 17:23



PENDIDIKAN - Penulisan berita investigasi memiliki kaidah atau pedoman yang penting untuk diikuti guna memastikan informasi yang disajikan akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut elaborasi kaidah penulisan berita investigasi:

**Fokus pada Fakta dan Data yang Terverifikasi:**

Dalam berita investigasi, fakta yang disajikan harus didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Penulis berita investigasi perlu melakukan penelitian mendalam, mencari bukti kuat, dan memastikan kebenaran dari setiap informasi yang diperoleh.

### **Menggali Informasi secara Mendalam (In-Depth Reporting):**

Berita investigasi berbeda dengan berita umum karena membutuhkan penggalian informasi yang lebih mendalam. Penulis harus mampu mengidentifikasi masalah yang kompleks, menemukan sumber informasi utama, dan mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang tidak mudah diakses publik.

### **Menjaga Keseimbangan (Balance) dan Keadilan (Fairness):**

Walaupun investigasi berfokus pada mengungkap kebenaran, penting bagi jurnalis untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat atau dituduh untuk memberikan tanggapan. Ini untuk menjaga keseimbangan informasi dan menghindari bias atau penyimpangan.

### **Penggunaan Narasumber Anonim Secara Bertanggung Jawab:**

Dalam banyak kasus investigasi, narasumber kunci mungkin takut akan konsekuensi yang bisa mereka hadapi jika identitas mereka diketahui. Penggunaan narasumber anonim diperbolehkan, tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk memverifikasi informasi dari sumber lain atau data pendukung yang kuat.

### **Transparansi Metode Investigasi:**

Penting bagi jurnalis untuk menjelaskan kepada audiens bagaimana data atau informasi diperoleh. Ini termasuk transparansi dalam proses investigasi, sumber-sumber yang digunakan, dan alasan mengapa metode tertentu dipilih. Hal ini meningkatkan kredibilitas berita dan memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan tersebut.

### **Etika Jurnalisme yang Kuat:**

Dalam berita investigasi, kode etik jurnalisme harus ditegakkan secara ketat. Ini termasuk menghindari fitnah, tidak menipu narasumber, dan tidak melakukan pencurian informasi. Integritas dan kejujuran adalah prinsip yang wajib dipegang teguh.

### **Menulis dengan Gaya yang Objektif dan Tidak Provokatif:**

Berita investigasi harus disampaikan secara obyektif dan tidak provokatif. Tujuannya adalah untuk menyajikan fakta, bukan untuk membangkitkan emosi atau mempengaruhi opini publik secara tidak berimbang. Bahasanya harus jelas, lugas, dan berdasarkan fakta.

### **Menghindari Generalisasi dan Spekulasi:**

Penulis berita investigasi harus berhati-hati agar tidak membuat generalisasi atau spekulasi yang tidak didukung oleh bukti. Setiap pernyataan harus berdasarkan data dan fakta konkret, bukan dugaan atau prasangka.

### **Penggunaan Bahasa yang Tepat dan Jelas:**

Bahasa yang digunakan dalam berita investigasi harus jelas dan mudah dipahami, meskipun topiknya mungkin kompleks. Jurnalis harus berusaha menghindari jargon teknis yang bisa membingungkan pembaca, namun tetap

menjaga akurasi terminologi.

### **Menyusun Cerita dengan Struktur yang Logis dan Alur yang Kuat:**

Struktur berita investigasi harus logis, dimulai dengan pengantar yang menarik perhatian, diikuti oleh latar belakang masalah, temuan-temuan utama, analisis data, dan penutup yang kuat. Cerita harus terjalin dengan alur yang membuat pembaca memahami masalah dan dampaknya.

Dengan mengikuti kaidah-kaidah tersebut, berita investigasi akan menjadi lebih akurat, dapat dipercaya, dan memberikan dampak yang signifikan kepada publik, baik dari segi informasi yang diungkap maupun perubahan yang mungkin dihasilkan dari pemberitaan tersebut.

Berikut adalah contoh berita investigasi fiktif yang menggambarkan kaidah penulisan berita investigasi:

### **Judul: Skandal Proyek Fiktif: Penggunaan Anggaran Pembangunan Fasilitas Umum yang Tidak Pernah Dibangun**

Oleh: Tim Investigasi Jurnalis

**Pengantar:** Sebuah proyek pembangunan fasilitas umum senilai miliaran rupiah di salah satu provinsi Indonesia diduga fiktif. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan selama tiga bulan, ditemukan bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, dan fasilitas yang seharusnya dibangun tidak pernah ada di lapangan.

**Latar Belakang:** Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi X mengumumkan proyek pembangunan beberapa fasilitas umum di 10 kabupaten yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Proyek tersebut mencakup pembangunan sekolah, pasar rakyat, dan pusat layanan kesehatan, dengan total anggaran mencapai Rp 150 miliar. Namun, beberapa bulan setelah pengumuman proyek tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dan keberadaan pembangunan yang dijanjikan.

**Penemuan Investigasi:** Tim investigasi dari Media Independen memulai penyelidikan pada awal tahun 2024 setelah mendapat informasi dari sumber anonim, seorang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum. Sumber tersebut mengungkapkan adanya indikasi bahwa proyek-proyek tersebut tidak pernah dibangun, meskipun dana anggaran telah dicairkan.

Dalam penyelidikan ini, tim turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi klaim tersebut. Dari 10 lokasi yang disebutkan dalam dokumen pemerintah, 8 di antaranya sama sekali tidak menunjukkan adanya aktivitas pembangunan. Tanah yang diklaim sebagai lokasi proyek, seperti pembangunan sekolah di Kabupaten A dan pusat layanan kesehatan di Kabupaten B, ternyata masih kosong dan tidak ada tanda-tanda dimulainya konstruksi.

“Kami sudah menunggu pembangunan ini sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda apa pun,” ujar seorang warga di Kabupaten A, yang menolak disebutkan namanya.

**Dokumen Fiktif:** Selain bukti lapangan, tim investigasi juga memperoleh

dokumen yang mengungkapkan bahwa laporan kemajuan proyek tersebut telah dipalsukan. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa pembangunan telah mencapai tahap 50% pada pertengahan 2023, dengan dana yang telah dicairkan sebanyak Rp 75 miliar. Namun, setelah diverifikasi, laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan dokumen internal yang berhasil didapatkan, ada sejumlah perusahaan kontraktor yang diduga terlibat dalam manipulasi data ini. Salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai pelaksana proyek ternyata tidak memiliki rekam jejak pekerjaan konstruksi, dan alamat kantornya ternyata fiktif.

**Tanggapan Pemerintah Daerah:** Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi X, Bapak Z, membantah tuduhan bahwa proyek tersebut fiktif. "Proyek ini masih dalam tahap awal. Ada keterlambatan karena masalah teknis, tapi anggaran masih aman," ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

Namun, setelah didesak terkait tidak adanya tanda-tanda pembangunan di lapangan dan laporan yang mencurigakan, Bapak Z tidak memberikan penjelasan yang memadai.

**Analisis Anggaran:** Dalam analisis lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran, tim investigasi menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 20 miliar yang masuk ke rekening pribadi beberapa pejabat pemerintah dan oknum kontraktor. Aliran dana ini tidak tercantum dalam laporan penggunaan anggaran resmi, sehingga memperkuat dugaan adanya korupsi dan penyelewengan dana.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada transparansi anggaran publik menyoroti skandal ini sebagai salah satu contoh korupsi sistematis dalam proyek pemerintah. "Ini adalah bentuk dari bagaimana dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru hilang begitu saja," ujar Ketua LSM tersebut.

**Kesimpulan:** Investigasi ini mengungkapkan adanya proyek fiktif yang melibatkan manipulasi laporan dan penyelewengan anggaran oleh pejabat pemerintah dan kontraktor swasta. Meskipun pemerintah daerah berusaha membantah tuduhan ini, bukti lapangan dan dokumen yang diperoleh menunjukkan adanya indikasi kuat korupsi yang melibatkan dana publik senilai ratusan miliar rupiah.

**Langkah Lanjutan:** LSM dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya telah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat segera diusut tuntas, dan para pelaku diadili.

**Catatan:** Berita di atas menunjukkan bagaimana investigasi dilakukan dengan mendalam, berbasis data yang diverifikasi, dan tetap menjaga keseimbangan dalam memberikan ruang kepada pihak yang dituduh untuk merespons tuduhan.

Jakarta, 16 September 2024

**Hendri Kampai**

(Wartawan Utama, Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI)